

Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Uni Soviet: Dimensi dan Prospek*

Harsja W. BACHTIAR

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Uni Soviet sesungguhnya menuntut diadakan dan dikembangkannya hubungan bilateral antara kedua negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan secara tegas bahwa penjajahan di atas dunia, kiranya juga dalam bentuk yang dikenal sebagai neo-kolonialisme, harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan, gagasan yang diajukan para pendiri Republik dan diwariskan pewaris-pewaris politik mereka sebagai nilai-nilai yang diorientasikan pada pemikiran dan juga tindakan. Pembukaan yang sama juga menghendaki bangsa Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka undang-undang Republik Indonesia menetapkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan yang bebas tetapi aktif.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Uni Soviet pada hakikatnya menetapkan rangkaian tindakan yang sama dan bahkan lebih spesifik karena menyatakan bahwa hubungan antara Uni Soviet dan negara-negara lain harus berdasarkan prinsip kesamaan hak-hak kedaulatan, saling menghindari penggunaan kekuatan ataupun ancaman penggunaan kekuatan, tidak diganggunya batas-batas wilayah dan integritas wilayah negara, penyelesaian masalah secara damai, tidak mencampuri masalah-masalah dalam negeri negara-negara lain, menghargai hak-hak asasi manusia dan kebebasan, persamaan hak-hak dan hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri, meningkatkan kerjasama an-

*Terjemahan makalah yang disampaikan Harsja W. Bachtiar, Kepala BP3K Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada "Soviet-Indonesian Symposium on the Problems of the Asian-Pacific Region," yang diselenggarakan oleh CSIS dan Academy of Sciences of the USSR, Institute of Oriental Studies, di Moskow, 19-21 September 1984. Makalah diterjemahkan oleh Redaksi.

tara bangsa, dan secara jujur melaksanakan tugas-tugas yang berakar pada prinsip-prinsip dan keputusan perjanjian internasional yang ditandatangani Uni Soviet.

Dalam dunia yang semakin kompleks, Indonesia makanya memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan hubungan yang positif dengan sebanyak mungkin negara lain, khususnya dengan kekuatan-kekuatan dunia seperti Uni Soviet. Pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan dengan sebanyak mungkin negara lain yang bisa diusahakannya apakah sosialis, kapitalis atau lainnya akan memungkinkan Indonesia untuk lebih aktif mengambil bagian dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Namun kemampuan untuk mengembangkan hubungan yang positif tersebut tentu sangat tergantung pada keadaan dalam negeri yang untungnnya terus-menerus berkembang baik akibat usaha-usaha pembangunan nasional dalam 15 tahun terakhir. Hubungan luar negeri termasuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Soviet juga membutuhkan waktu untuk dikembangkan sebagaimana halnya banyak masalah lain.

BANYAK PERSAMAAN

Indonesia dan Uni Soviet memiliki banyak persamaan karakteristik walaupun jarak geografis yang jauh dan memisahkan kedua negara. Untuk pembahasan sekarang ini hanya enam persamaan dasar akan disebutkan walaupun kenyataannya masih banyak lagi dapat digarisbawahi.

Pertama, wilayah kedua negara cukup luas, kendatipun kenyataan bahwa wilayah Indonesia berbentuk kepulauan yang membentang antara benua Asia dan Australia dan antara Samudra Hindia dan Pasifik sementara wilayah Uni Soviet berbentuk daratan yang luas sekali, sebagian terletak di Eropa dan sebagian di Asia.

Kedua, kedua negara memiliki sumber daya alam yang kaya. Oleh karena perbedaan lokasi geografis, ciri-ciri fisik wilayah, dan cuaca, yang selanjutnya dibedakan oleh perbedaan dalam bentuk perkembangan historis khususnya mengenai pengembangan penerapan sains dan teknologi bagi pemanfaatan sumber daya alam yang ada, kedua negara memiliki perbedaan jenis sumber daya alam, perbedaan antara fauna dan flora yang paling menonjol.

Ketiga, kedua negara memiliki sumber daya manusia yang kaya, Indonesia yang berpenduduk lebih dari 150 juta dan Uni Soviet lebih dari 200 juta rakyat. Perbedaan bentuk perkembangan historis antara kedua negara yang

ditunjuk sebelumnya juga mempengaruhi pembentukan ciri-ciri sumber daya manusia yang ada di masing-masing negara.

Keempat, kedua negara secara politis dibentuk melalui mekanisme revolusi. Revolusi Indonesia pada 1945-1950 dan Revolusi Rusia 1917-1922, yang pertama menghasilkan republik kesatuan dan yang kedua menghasilkan kesatuan republik.

Kelima, kedua negara berada dalam proses perubahan aneka-ragam masyarakat, di Indonesia yang umumnya menyangkut kelompok etnis dan suku dan di Uni Soviet suku dan kebangsaan, menjadi suatu masyarakat historis yang baru, masyarakat Indonesia di Indonesia dan masyarakat Soviet di Uni Soviet.

Dan akhirnya, kedua negara melaksanakan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan rangkaian rencana pembangunan nasional lima tahun; Indonesia sedang melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-4 sedangkan Uni Soviet giat melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-11.

PENGARUH IDEOLOGI

Pengaruh ideologi rekanan-rekanan yang ikut-serta dalam hubungan bilateral Indonesia-Uni Soviet seharusnya tidak diremehkan. Adanya pemikiran ideologi tidak perlu dianggap sebagai masalah yang menghambat tetapi lebih baik sebagai suatu kenyataan yang perlu diperhitungkan dalam suatu hubungan yang saling menguntungkan. Masyarakat Indonesia dan Uni Soviet terikat untuk diarahkan oleh ideologi masing-masing dalam tindakan-tindakan mereka.

Jelas ideologi Indonesia menempatkan keyakinan akan Tuhan pada kedudukan utama pandangan hidupnya, walaupun interpretasi teologisnya yang sebenarnya diserahkan pengajaran masing-masing kelima agama besar yang diakui di negara ini, yakni Islam, Roma Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Terpusatnya keyakinan akan Tuhan dalam pemikiran umum dan resmi, yang tidak perlu dijadikan hukum dalam ritual masing-masing agama, cenderung menyebabkan Indonesia menolak mereka yang menyatakan tidak percaya akan adanya Tuhan. Pada situasi tertentu penolakan ini dapat juga mengembangkan sikap bermusuhan dan kadang-kadang menjadi tindakan kekerasan. Namun ideologi yang sama ini juga menetapkan toleransi terhadap ritual dan keyakinan agama masyarakat yang beragama lain.

Ideologi nasional Indonesia juga banyak menekankan nasionalisme dan dengan demikian kesatuan seluruh rakyat Indonesia, yang mengabaikan per-

bedaan suku, etnis, agama atau sosio-ekonomi; kedaulatan rakyat, yang tercermin dalam permufakatan bersama yang harus dicapai melalui pertimbangan yang matang oleh mereka yang dipercayakan untuk bertindak sebagai wakil-wakil rakyat; kemanusiaan, yang dianggap sebagai ciri-ciri sebenarnya dari makhluk berbudaya; dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara republik.

Sejak 1978 pemerintah telah dicanangkan untuk mengawasi seluruh sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan merupakan sumber kehidupan bagi kebanyakan rakyat. Monopoli yang merugikan kepentingan masyarakat harus sama sekali ditolak karena sistem tersebut dikenal sebagai etatisme, sistem di mana keadaan "abd uts ecibinuc agebcues" adalah "dinubabtm" dan makanya cenderung untuk mengesampingkan kekuatan-kekuatan unit-unit ekonomi yang potensial dan kreatif, yang berada di luar sektor kegiatan yang diatur langsung oleh negara.

Di pihak lain pemerintah juga telah dicanangkan untuk menghindari terbentuknya "free fight liberalism," ciri sistem kapitalis, yang merupakan salah satu penyebab eksploitasi manusia dan bangsa secara menyedihkan.

Namun perlu ditekankan bahwa pertumbuhan perbedaan sosio-ekonomi dan politik, termasuk pertumbuhan struktur stratifikasi sosial, tidak perlu merupakan akibat terbentuknya pertentangan kelas dalam masyarakat Indonesia.

Dalam tahun-tahun berikutnya usaha yang teratur dilakukan untuk memberi penerangan pada rakyat seluas-luasnya mengenai pengetahuan ideologi nasional, Undang-Undang Dasar, dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Ideologi nasional yang dikenal sebagai Pancasila digambarkan jelas bukan bersifat liberal ataupun komunis.

Landasan teoretis kebijakan luar negeri Soviet, yang dibentuk oleh ideologi Marxis-Leninis, didasarkan atas dua prinsip, yakni internasionalisme proletar dan koeksistensi damai. Ide koeksistensi damai tidak menjadi masalah bagi rakyat Indonesia karena mereka juga memiliki ide yang sama.

Namun ide internasionalisme proletar yang menyangkut solidaritas internasional, saling membantu, dan kesatuan tindakan dari apa yang disebut rakyat pekerja semua negara dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama, yang dipercayai berasal dari kenyataan bahwa para pekerja semua negara di dunia memiliki iklim sosial yang sama dan di masyarakat sosial menempati kedudukan yang sama dalam produksi dan dengan demikian dalam kehidupan sosial, benar-benar menghadapi masalah yang amat serius. Internasionalisme proletar memaksa warga negara Uni Soviet dalam hubungan bila-

teral untuk membentuk ikatan-ikatan solidaritas dan saling membantu dengan sektor-sektor tertentu penduduk negara lain, suatu kecenderungan yang jelas mencampuri masalah dalam negeri negara lain.

Pemikiran ideologi ini juga tidak perlu dianggap sebagai suatu masalah yang menghalangi pengembangan hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Soviet tetapi implikasinya perlu dipertimbangkan secara hati-hati dalam menyusun pengaturan yang tepat bagi penerapan hubungan secara efektif.

HUBUNGAN POLITIK

Hubungan politik antara Indonesia dan Uni Soviet telah dimulai pada hari-hari pertama Revolusi Indonesia ketika Andrei Vishinsky dan Andrei Gromyko yang mewakili Uni Soviet menyatakan dukungan yang sangat kuat bagi Republik Indonesia yang baru terbentuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika sebagian besar negara anggota sebenarnya mendukung maksud Belanda, maksud penjajah.

Sebenarnya telah dua atau tiga dasawarsa sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, kegiatan-kegiatan politik tertentu telah berlangsung antara beberapa tokoh politik di Uni Soviet, terutama mereka yang berhubungan dengan Komintern, dan beberapa tokoh politik di Indonesia khususnya mereka yang berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia.

Kontribusi politik yang paling positif yang diberikan Uni Soviet kepada bangsa Indonesia adalah dukungan politiknya yang kukuh bagi bangsa Indonesia selama tahun-tahun pertama yang sulit dengan berdirinya republik. Kontribusi positif ini agak dirusak ketika pecah pemberontakan komunis di wilayah Madiun, Jawa Timur, pada 1948, tepat ketika hampir seluruh bangsa Indonesia sedang berjuang keras menghadapi Belanda, yang bermaksud untuk membangun kembali kekuatan kolonial mereka di koloni mereka sebelumnya di Asia.

Akhirnya Republik Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaannya dan hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat lainnya segera diadakan. Uni Soviet berada di antara negara-negara sahabat pertama dengan siapa Indonesia mengadakan hubungan diplomatik, suatu peristiwa yang berlangsung resmi pada tanggal 3 Februari 1950. Empat tahun sesudahnya, pada tanggal 19 Maret 1954, Indonesia secara resmi membuka kedutaan besarnya di Moskow, dengan Dr. Soebandrio sebagai duta besar pertama. Sejak itu banyak kegiatan politik dilakukan antara kedua negara bersahabat dan para warganya.

Uni Soviet terus memberi dukungan politiknya bagi perjuangan Indonesia melawan sisa-sisa kolonialisme Belanda di wilayah kepulauan, yakni usaha untuk membebaskan Irian Barat. Namun mengenai pembebasan Timor Timur Uni Soviet sayangnya tidak sama-sama mendukung walaupun ia tidak bertindak menentang Indonesia secara langsung atas masalah tersebut.

Indonesia dan Uni Soviet juga telah melibatkan diri mereka bersama-sama dalam banyak kegiatan politik internasional lainnya karena, sebagaimana telah dicatat, kedua negara telah dan masih memiliki banyak sasaran bersama seperti kasus Palestina dan Libanon.

Tokoh-tokoh politik Indonesia banyak berkunjung ke Uni Soviet untuk membahas masalah-masalah kepentingan bersama dan dalam proses untuk mempelajari lebih banyak mengenai pihak lainnya, seperti kunjungan baru-baru ini oleh Almarhum Wakil Presiden Adam Malik pada saat pemakaman Leonid Brezhnev pada 1982 dan kunjungan lebih baru oleh Menteri Luar Negeri Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja dalam bulan April 1984.

Demikian pula tokoh-tokoh politik Uni Soviet juga telah berkunjung ke Indonesia, termasuk kunjungan baru-baru ini oleh Antanas Stasovich Barkauskas, Wakil Ketua Dewan Tertinggi Soviet, dalam bulan Juli 1982, dan kunjungan Prof.Dr. M.S. Kapitsa, Wakil Menteri Luar Negeri pada 1983.

Secara politis Indonesia terikat pada suatu kebijakan bebas-aktif, yang berusaha tunduk pada ajaran ideologi nasional, Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negaranya, sebagaimana ditentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini juga, sesuai dengan kebijakan dasarnya, terikat pada Gerakan Non-Blok yang berusaha keras untuk menjunjung tinggi kemerdekaan sosio-politik dan ekonomi negara-negara di dunia di mana dua kamp bersenjata dan bermusuhan saling berhadap-hadapan dan cenderung mempertentangkan seluruh dunia secara cukup tajam yang menciptakan suatu dunia yang dikoyak oleh konflik politik secara menyedihkan dan kegun-cangan ekonomi. Gerakan tersebut memperjuangkan suatu tata dunia baru atas dasar kemerdekaan, perdamaian, persamaan dan keadilan, suatu keadaan yang diharapkan bisa menjamin tanpa tindakan-tindakan destabilisasi politik, kekerasan ekonomi, subversi atau intervensi, apalagi peperangan.

Oleh karenanya Indonesia berkewajiban untuk memelihara hubungan positif dengan kedua kekuatan dunia yang saling bermusuhan, tidak hanya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya sendiri tetapi juga mencari cara dan sarana untuk memberi kontribusi positif bagi usaha-usaha perbaikan dunia yang sekarang terpecah-pecah.

HUBUNGAN EKONOMI DAN PERDAGANGAN

Perbedaan geografis dan dengan demikian juga perbedaan iklim, sebagaimana terwujud dalam suatu distribusi sumber daya alam yang tidak merata, antara Indonesia dan Uni Soviet menjadi dasar yang kuat bagi kemungkinan pengembangan bentuk pembagian tugas (*division of labour*), mungkin sebagai bagian dari pembagian tugas secara lebih luas. Kemungkinan pembagian tugas ini dan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dan selaras tentu saja membutuhkan baik bahan mentah maupun juga produk-produk penerapan sains dan teknologi, termasuk sarana produksi.

Indonesia jelas menghasilkan bahan-bahan mentah seperti karet alam, minyak kelapa sawit mentah (CPO), kopi, teh, lada hitam, kayu manis, dan jenis-jenis kayu tertentu; dan barang-barang industri seperti tekstil dan pakaian. Produk-produk tersebut dan lainnya yang khusus untuk daerah tropis atau wilayah budaya Indonesia, dapat ditawarkan pada Uni Soviet untuk pembelian atau pertukaran. Dilaporkan bahwa pada 1983 Uni Soviet antara lain telah memesan sekitar 60.000 ton karet lembaran dari Indonesia.

Uni Soviet sebaliknya menghasilkan berbagai barang lain, khususnya barang-barang industri, yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia membutuhkan kapas; pupuk mineral; bahan kimia; mesin termasuk alat-alat berat untuk kegiatan pertanian dan kegiatan produksi tekstil; berbagai peralatan; pipa, seperti pipa gas; dan banyak komoditi lainnya.

Indonesia dan Uni Soviet telah menandatangani Perjanjian Perdagangan pertama dalam bulan Agustus 1965. Suatu Perjanjian Perdagangan yang lebih baru telah ditandatangani pada tanggal 23 Maret 1974, ketika Ivan T. Grishin, Wakil Menteri Uni Soviet berkunjung ke Jakarta. Suatu kontrak perdagangan penting yang berjumlah US\$90 juta diadakan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia dan rekan mereka di Uni Soviet, pada kunjungan belum lama ini oleh delegasi Kamar Dagang dan Industri yang dipimpin oleh Sukamdani S. Gitosardjono ke Moskow, 22-27 Juni, 1984.

Kegiatan-kegiatan perdagangan ini jelas cukup membesarkan hati tetapi mengingat luas wilayah, kekayaan sumber daya alam, dan besarnya jumlah penduduk Indonesia maupun Uni Soviet, volume perdagangan antara kedua negara masih terlalu rendah dan pada dasarnya dapat ditingkatkan. Untuk memperoleh perspektif yang lebih baik, patut diperhatikan bahwa volume perdagangan beberapa negara yang lebih kecil di kawasan Asia Tenggara dengan Uni Soviet lebih tinggi daripada volume perdagangan Indonesia. Misalnya pada 1983 volume perdagangan total kawasan ASEAN dengan Uni Soviet yang dinyatakan dalam dollar AS adalah US\$640 juta. Bagian Singapura adalah sekitar US\$100 juta; bagian Malaysia sekitar US\$250 juta; sedangkan

bagian Indonesia, bagian dari negara anggota terbesar, hanya US\$74 juta.

Suatu wilayah yang luas, khususnya wilayah dalam bentuk kepulauan, memiliki keuntungan tetapi juga kerugian. Peraturan yang sah dan institusional yang mungkin efektif di satu bagian atau beberapa bagian wilayah mungkin tidak cocok dilaksanakan di beberapa bagian lainnya oleh karena langkanya personalia yang terlatih secara tepat dari agen-agen pelaksana atau faktor-faktor lain.

Masih terdapat beberapa peraturan yang tidak praktis di Indonesia yang tidak memperlancar perdagangan antara Indonesia dan Uni Soviet. PT Panca Niaga, sebuah perusahaan dagang swasta Indonesia, telah dipercayakan oleh Pemerintah Indonesia (sejak 1978), bertugas untuk mengkoordinasi seluruh transaksi perdagangan antara perusahaan-perusahaan dagang Indonesia dan rekan mereka di negara-negara sosialis termasuk Uni Soviet. Kegiatan koordinator juga meliputi tugas mengeluarkan surat-surat rekomendasi dengan maksud untuk memperoleh visa bagi kalangan pengusaha negara-negara sosial yang ingin berkunjung ke Indonesia.

Empat pelabuhan di kepulauan, yakni pelabuhan Tanjung Priok dekat Jakarta, Medan di Sumatera Utara, Surabaya di Jawa Timur, dan Ujung Pandang di Sulawesi Selatan, telah ditunjuk sebagai pelabuhan-pelabuhan impor bagi kapal-kapal dari negara-negara sosialis. Kapal-kapal muatan asing diharuskan melaporkan daftar awak kapal mereka dua minggu sebelum memasuki pelabuhan.

Selain itu perusahaan-perusahaan bisnis Indonesia jarang, jika sekiranya ikut-serta dalam Pekan Raya Perdagangan Internasional yang diselenggarakan secara teratur di Uni Soviet, dan akibatnya pembeli-pembeli yang potensial di Uni Soviet tidak memiliki kesempatan yang berharga untuk menilai barang-barang yang ditawarkan orang-orang Indonesia untuk dijual.

Sebaliknya kalangan pengusaha Indonesia mengeluh mengenai ketidakteraturan tibanya kapal-kapal muatan Rusia yang menyulitkan mereka untuk melakukan pengaturan yang tepat bagi pengiriman barang. Mereka menggantungkan diri pada kapal-kapal tersebut dalam melakukan perdagangan dengan Uni Soviet.

Karena produksi dan perdagangan Uni Soviet tunduk pada ketentuan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Rencana Tahunan Kebutuhan Impor yang berlaku, kalangan pengusaha Indonesia yang berminat jelas perlu mengetahui dan memahami bagian-bagian yang relevan dari rencana-rencana tersebut dan dengan demikian bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan perdagangan mereka. Agaknya lebih mudah untuk berdagang dengan Uni Soviet

daripada dengan perusahaan-perusahaan bisnis yang bersaing di negara-negara kapitalis karena perdagangan luar negeri di Uni Soviet dikoordinasi oleh Kementerian Perdagangan Luar Negeri Uni Soviet dengan sekurang-kurangnya 60 perusahaan negara, walaupun berdagang dengan pejabat-pejabat pemerintah tidak begitu sama dengan para pengusaha swasta, yang dapat memutuskan sendiri, membuat perencanaan sendiri, dan melaksanakan keputusan dan rencana mereka sendiri.

Pendeknya jika perdagangan antara kedua negara diperluas kedua belah pihak perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap pengaturan-pengaturan sekarang ini. Ini berlaku juga bagi aspek-aspek non-ekonomis dari hubungan perdagangan.

HUBUNGAN KEBUDAYAAN: JUGA PENTING

Uni Soviet telah mewarisi suatu peninggalan budaya yang mengagumkan dari generasi masa lalu, dan terus memperkaya warisan ini dengan hasil-hasil produktivitas budaya baru dan betul-betul murni dalam bidang filsafat, sastra, musik, balet, drama, perfilman, dan bidang-bidang kreativitas seni lainnya. Suatu bagian warisan budaya yang menonjol telah diterima secara praktis dan universal sebagai kontribusi yang bagus sekali bagi kebudayaan dunia. Ini jelas halnya dalam bidang sastra dan musik. Karya besar sastra seperti karya-karya Fyodor Dostoyevsky, Lev Tolstoy, Alexander Pushkin, Ivan Turgenev, Anton Chekhov, Maxim Gorki, dan Vladimir Mayakovsky hampir pasti menjadi bagian harta karun kesusastraan dunia untuk dibaca, diapresiasi, dan dinikmati oleh semua pencinta sastra. Komposisi musik besar oleh komposer-komposer Rusia Mikhail Glinka, Alexander Borodin, Pyotr Tchaikovsky, Nikolai Rimski-Korsakov, Alexander Glazunov, dan Arthur Rubinstein memperkaya pengalaman seni dari massa rakyat di seluruh dunia dan tentu juga termasuk masyarakat Indonesia.

Usaha-usaha untuk meningkatkan masuknya karya-karya besar budaya ini ke Indonesia melalui penerbitan terjemahan dan pembahasan karya-karya sastra ini dan juga pertunjukan-pertunjukan musik, balet, drama dan pertunjukan boneka menyebabkan masyarakat Indonesia lebih sadar dan menghargai warisan budaya Rusia yang kaya dan memberi kesempatan bagi lebih banyak orang Indonesia untuk memanfaatkan formasi suatu budaya dunia yang sedang berjalan.

Usaha untuk meningkatkan masuknya warisan budaya Rusia membutuhkan ciptaan dan pengembangan ilmuwan, penterjemah, dan artis Indonesia yang memiliki kemampuan untuk belajar dan memahami tulisan-tulisan dan pertunjukan Rusia dan juga kemampuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan

profesional mereka secara berarti bagi publik Indonesia. Produk-produk dari usaha bersama mereka akan merupakan sumber yang sangat berharga bagi diperkayanya budaya Indonesia sendiri.

Adalah suatu kekeliruan yang serius jika tidak disebutkan lebih banyak aspek budaya, atau budaya-budaya masyarakat Soviet, gagasan-gagasan tersebut yang membuat orang-orang Rusia dan Soviet lainnya apa adanya, keyakinan mereka, pengertian mereka, nilai dan simbol-simbol ekspresif mereka. Setiap masyarakat -- tidak terkecuali masyarakat Indonesia dan Soviet -- memiliki budaya mereka sendiri yang memberi arti bagi hidup dan lingkungan di mana mereka berdiam.

Dalam pengembangan hubungan bilateral, usaha-usaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian budaya masing-masing tidak seharusnya diabaikan tetapi sebaliknya perlu digiatkan. Ini antara lain berarti bahwa adalah mutlak perlu untuk memperkuat studi-studi Rusia atau Soviet di Indonesia dan memperkuat studi Indonesia di Uni Soviet. Usaha untuk memperkuat kedua bidang studi perlu mencakup masalah-masalah pendidikan dan latihan -- periode inkubasi bagi calon ilmuwan biasanya membutuhkan banyak waktu -- beasiswa, kepastakaan, organisasi dan alokasi anggaran. Tidak dapat dielakkan ketegangan antara mereka yang lebih menyukai tradisi klasik dan mereka yang lebih menyukai manifestasi-manifestasi budaya yang lebih kontemporer, modern. Jelas ini menganggap bahwa studi masing-masing budaya mencakup setidaknya-tidaknya studi bahasa, sastra, struktur sosial, dan sejarah.

Kendatipun adanya urgensi untuk mencapai kemampuan guna menghadapi kepekaan budaya dalam mempertahankan dan selanjutnya mengembangkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Soviet, mungkin benar, bahwa pada saat ini taraf pengetahuan dan pemahaman akan kebudayaan bangsa Soviet sangat rendah dan makanya sangat membutuhkan pengembangan.

KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA

Mungkin hal yang paling penting dalam pengembangan hubungan dengan negara-negara asing, setidaknya-tidaknya dilihat dari perspektif Indonesia, adalah keyakinan bahwa Indonesia harus menentukan tujuannya sendiri dengan caranya sendiri. Prinsip ini jelas diakui praktis oleh semua pemerintah yang beradab dan rakyatnya walaupun pengakuan resmi atas prinsip ini tidak perlu berarti bahwa dalam semua situasi prinsip ini diterima dalam tindakan.

Apa pun arah pembangunan dianggap benar, tepat, arah pembangunan bagi negara-negara baru merdeka di Asia dan Afrika, Indonesia telah memilih

arah pembangunan dan diputuskan untuk mengikutinya. Pada tahap sekarang perkembangan historis transformasi masyarakat Indonesia dari suatu masyarakat terjajah dan terbelakang menjadi masyarakat yang merdeka di mana telah terwujud ideologi nasional, pilihannya adalah bukan kapitalisme ataupun sosialisme. Indonesia memiliki arah pembangunan sendiri yang unik, walaupun terdapat aspek-aspek kapitalisme maupun sosialisme dalam arah pembangunan yang dipilihnya. Mereka yang menganut kapitalisme ataupun sosialisme bisa menghadapi kesulitan dalam memahami eksistensi suatu pilihan seperti itu dan sebenarnya mungkin menganggap kenyataan-kenyataan yang relevan sebagai penyimpangan, atau distorsi sementara dari arah pembangunan yang tepat.

Masyarakat Indonesia ikut memelihara dan mengembangkan keunikan sejarah budaya dan sosial masyarakat Indonesia yang secara etnis beraneka-ragam tetapi bersatu. Baik kapitalisme maupun sosialisme, jika diterapkan sepenuhnya bagi usaha pembangunan di Indonesia, tentu akan merusak identitas sosial dan budaya Indonesia.

Benar suatu usaha yang terpusat harus dilakukan untuk memperluas produksi atau dengan kata lain untuk meningkatkan produksi melalui pemanfaatan sumber daya alam, materi, keuangan, dan tenaga kerja yang ada secara lebih baik melalui penerapan sarana-sarana produksi yang lebih efektif dan secara teknis lebih baik. Tetapi ideologi nasional dan segala hal-hal berarti lainnya tidak perlu dikorbankan. Misalnya, keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Kuasa tidak selalu perlu menjadi pusat perhatian tanpa memperhatikan penafsiran agama yang lebih spesifik dari seseorang. Ideologi nasional tidak perlu hanya diberi haknya pada produksi barang-barang dan jasa, tetapi juga pada distribusi produk-produk ekonominya.

Untuk memungkinkan Indonesia melanjutkan usaha-usaha pembangunan nasionalnya, perlu sekali memelihara perdamaian dan kestabilan di Indonesia bahkan lebih terjamin jika perdamaian dan kestabilan dapat dipertahankan di seluruh kawasan Asia Tenggara. Adalah menggembirakan diperhatikan bahwa akhir-akhir ini Uni Soviet telah menganut pandangan yang tepat bahwa ASEAN tidak dianggap sebagai alat kapitalis yang menentang Uni Soviet, bahwa kekuatan kolektif ASEAN sebenarnya merupakan suatu kontribusi positif bagi perdamaian dan kestabilan dunia.

Gagasan yang sama juga mendorong Indonesia untuk berusaha menjadikan Samudra Hindia yang akhir-akhir ini secara potensial berselisih, suatu zona damai, bebas, dan netral di mana kemungkinan penyebab-penyebab konflik masa mendatang dihilangkan. Kekuatan-kekuatan besar utama Uni Soviet dan Amerika Serikat sayangnya tidak begitu tertarik pada kepentingan nasional negara-negara di Asia Tenggara.

Hubungan bilateral yang lebih aktif antara Indonesia dan Uni Soviet memungkinkan mereka saling berkenalan yang diharapkan dapat mengarah pada peningkatan pengetahuan dan pengertian masing-masing aspirasi dan kepentingan nasional satu sama lain.

Pada saat pemilihan Konstantin Chernenko sebagai Ketua Presidium Tertinggi Soviet dalam bulan April 1984, Presiden Indonesia Soeharto menekankan kembali pandangan bahwa pemerintah Indonesia berkeinginan untuk memperdalam hubungan dan kerjasama yang bersahabat antara kedua negara, suatu pernyataan yang tidak hanya berarti sebagai suatu basa-basi diplomatik, tetapi dimaksudkan untuk dilaksanakan, sebagaimana terlihat dalam penggiatan hubungan antara kedua negara baru-baru ini.